

Refleksi Pemikiran Politik dan Ekonomi Islam Ibn Khaldun atas Pemerintahan di Indonesia

Regina Citra Arini

Mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Islam Universitas Paramadina dan alumnus Universitas Nasional Jakarta.
reginacitra@gmail.com

Abstract: Today the 45th generation which can be categorized as the first generation that gave birth to the Republic of Indonesia, there are still many people, but in the same period the second and third generations have also emerged. In this case, in the third generation in a country, where this generation is soft and connoisseurs of power and prosperity, without hard work and creativity, the country experiences destruction, because this generation is immersed in luxury, timid and loses the meaning of honor, courage and courage. The BLBI case, Mega KKN at Pertamina, the case of Bank Bali and the architect of social unrest in various regions are indicators of the existence of the second and third generations. Ibn Khaldun believed that a society which at first was good or at least neutral was damaged by a uncivilized group of people.

Keywords: Indonesia, Ibnu Khaldun, peradaban, agama.

Pendahuluan

Pemikiran politik Islam menjadi bagian yang terpenting dalam membentuk suatu negara terutama dalam sejarah intelektual manusia secara umum. Pemikiran ini terdiri atas sebuah tradisi yang koheren dan berkelanjutan, terpisah dari tradisi Barat dan memiliki logikanya sendiri. Harun Nasution, berkesimpulan bahwa dalam Al Qur'an tidak ditemukan ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negaradan sistem pemerintahan yang harus berlaku dalam Islam. Yang pentingadalah dilaksanakannya ajaran Islam dalam masyarakat. Amin Rais, lebih tegas lagi mengatakan bahwa dalam Al Qur'an dan Sunnah tidak ada perintah yang menyatakan untuk mendirikan negara Islam. Hal ini menunjukkan keabadian wahyu yang di dalamnya memuatetik dasar, serta norma-norma kemudian menyerahkan hal detail pada akalmanusia dengan jalan ijtihad. Keyakinan Nurcholish Madjid terhadap prinsip-prinsip universal dalam Al Qur'an adalah puncak spiritual dalam mencari solusi atas ketimpangan Islam dan keadilan serta krisis kemanusiaan (human crisis). Ia menggunakan istilah tauhid terhadap tema-tema yang dirujuk dari Al Qur'an seperti ibadah, zakat, dzikir atau Islam, iman dan ihsan sebagai metode.

Jika melihat sejarah kembali, bahwa abad pertengahan dalam sejarah Islam, merupakan abad penuh pemikir dan pemikiran dalam berbagai bidang. Salah satu pemikir (ahli) pada waktu itu adalah Ib Khaldun, seorang ahli pikir Islam yang jenius dan termasyhur di kalangan intelektual modern. Abdurrahman ibn Khaldun (Tunisia 1332 - Kairo (1406)⁴ menjalani kehidupan yang penuh gejolak, bahkan untuk ukuran para intelektual muslim. Ia mendapatkan pendidikan agama konvensional dan bisa mempelajari filsafat secara ekstensif dengan membaca karya-karya Plato, Ibn Sina dan Ibn Rusyd yang melaluinya ia mengenal Aristoteles. Bagi pemuda yang antusias ini metafisika adalah ilmu yang paling mulia, orang yang memahaminya akan sangat bahagia karena ilmu-ilmu lain membutuhkannya sementara ia tidak membutuhkan ilmu yang lain.

Pengalaman politik Ibn Khaldun menjadi latar yang baik bagi pemahamannya mengenai

masyarakat politik dan bagi pemanfaatan sumber-sumber historis. Muqaddimah-nya secara unik mengombinasikan genre fikih, Nasehat kepada Raja dan filsafat. Namun, pada satu kesempatan ia menyatakan bahwa ia lebih merasa asyik dalam analisis empiris data-data historis bukan dalam bidang fikih atau teologi.

Dalam karya-karya IbnKhaldun dapat dilihat penguasaannya terhadap berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan, seperti sejarah, sosiologi, dan politik sehingga tidak mengherankan apabila Ibn Khaldun dikategorikan menjadi ahli sejarah, sosiologi, dan politik. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Ibn Khaldun adalah makhluk yang paling penting dan paling terhormat dalam alam semesta.⁶ Dalam mengemukakan konsep politiknya Ibn Khaldun tidak dapat lepas dari kenyataan yang dihadapi dan dialami.

Disatu pihak ia melihat ikatan-ikatan bermasyarakat, bernegara dan berperadaban pada umumnya sebagai sesuatu yang berkembang terlepas dari agama, tetapi dipihak lain Ibn Khaldun adalah seorangmuslim dan tentu saja sangat mempengaruhi sikapnya dalam memandang masalah Tuhan, manusia dan masyarakat. Makalah ini akan mencoba menggambarkan mengenai konsep yang ditawarkan oleh Ibn Khaldun mengenai negara dan pemerintah, dengan penjelasan utamanya mengenai Ashabiyah dan perannya dalam pembentukan negara, kejayaan dan keruntuhannya.

Teori Perubahan Sosial Ibn Khaldun

Teori perubahan sosial Ibn Khaldun merupakan pengembangan teori Aristoteles tentang asal-usul masyarakat politik yang telah diislamkan. Dia kemudian membahas bagian-bagian dunia yang dapat ditempati serta pengaruh iklim dan lingkungan termasuk makanan atas manusia dengan cara seperti yang telah ditempuh oleh Fernand Barudel.Lalu ia memusatkan perhatiannya pada masalah alat produksi.”Perbedaan kondisi diantara manusia merupakan hasil dari perbedaan cara-cara mereka dalam mencari nafkah.Sebagian orang hidup dengan bertani yang lain dengan beternak.⁷ Seraya mengakui pentingnya aspek yang disebut oleh Marx “landasan ekonomi”, Ibn Khaldun memunculkan dua kategori sosial fundamental (komunitas pedalaman, masyarakat primitive, daerah gurun) dan kehidupan kota, masyarakat beradab.Keduanya, merupakan fenomena yang “alami” dan “niscaya”.Untuk bertahan komunitas pedalaman atau masyarakat kesukuan harus memiliki sentimen kelompok (ashabiyah).Sentimen yang sangat penting ini didefinisikan sebagai “cinta dan kasih sayang seorang manusia kepada saudara atau tetangganya ketika salah satu darinya diperlakukan secara tidak adil atau disakiti”. Perasaan itu muncul dari hubungan kekeluargaan atau yang sejajar dengannya (seperti hubungan kebangsaan). Menurutnya,‘tidak ada seorangpun yang dapat mengenyahkan sentimen tersebut.

Ibn Khaldun secara khusus mendefinisikan “ashabiyah sebagai kekuatan pendorong dalam perjalanan sejarah manusia; kekuatan militer suatu kelompok dan potensinya sebagai pemain politik ditentukan oleh apakah ia mempunyai ashabiyah atau tidak.” Sentimen kelompok menghasilkan kemampuan untuk bertahan dan menentang klaim-klaim seseorang. Siapapun yang tidak memiliki, maka ia terlalu lemah untuk melakukan sebagian dari semua hal itu”. Dari semua elemen ini muncul teori Ibn Khaldun tentang perkembangan perubahan dan kemerosotan.Tujuan (takdir, tujuan akhir) ashabiyah adalah pembentukan kerajaan(mulk)⁹ Sesungguhnya dalam kelompok apa pun memiliki sentimen kelompok,satu orang di antara mereka pasti akan muncul sebagai kekuatan Pengendali; ia dapat memaksa orang lain untuk menerima keputusannya dan karenanya kedudukan sebagai kepala suku hingga tahta raja (mulk:kedaulatan) senantiasa menjadi idaman manusia.Dengan kata lain

manusia cenderung menciptakan atau mengambil alih kepemimpinan (negara).

Salah satu ciri kedaulatan adalah pembangunan kota-kota dan pada aspek inilah Ibn Khaldun mempertimbangkan secara detail eksistensi kota-kota dan kehidupan kota, peradaban yang menetap, kategori kedua eksistensi sosial yang ia kontraskan dengan komunitas pedalaman.¹⁰ Sementara kota kecil dan kota besar adalah produk sekunder dari kedaulatan. Dinasti dan kerajaan (mulk) adalah bentuk perkembangan final dalam peradaban manusia dan kota-kota adalah bahan dasar material mereka.

Karya Ibn Khaldun

Ibn Khaldun mendapat gelar Waliyyuddin, ia lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan 732 H. (1332 M) dan meninggal di Kairo Mesir pada tanggal 25 Ramadhan 808 H. Ibn Khaldun merupakan tokoh muslim terkemuka, bahkan di zamannya ia dikenal sebagai ilmuwan pioner yang memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung fakta-fakta yang terjadi.¹¹ Ibn Khaldun juga terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik, serta pernah juga terjundalam kancah politik praktis. Itu semua tidak terlepas dari latar belakangnya yang pernah menjadi politisi, intelektual, sekaligus aristokrat. Bahkan sebelum pindah ke Afrika, keluarganya pernah menjadi pemimpin politik di Moor Spanyol. Pendidikan Ibn Khaldun dimulai dari ayahnya sendiri yang bertindak sebagai guru pertama. Selain itu, Ibn Khaldun juga belajar ilmu logika, teologi, matematika, dan juga astronomi kepada Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim al-Arabi.

Secara garis besar kehidupan Ibn Khaldun keterlibatan dalam dunia politik pada masa itu ditandai oleh kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik. Ibn Khaldun tidak mengelak dalam berbagai intrik politik tersebut. Latar belakang pendidikan- nya telah membedakan ia dengan tokoh politik kala itu. Disamping terlibat penuh dengan dalam dinamika intrik, ia juga menyempatkan diri sebagai pengamat perilaku- perilaku politik kaum elit.¹² Karir politiknya dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibn Tafrakin. Ketika Ibn Tafrakin ditaklukan Abu Zaid, dalam sebuah intrik dan perebutan kekuasaan, Khaldun mlarikan diri dan bekerjasama dengan Sultan Abu Inan di Tleemeen sebagai sekretaris Sultan Abu Inan dari Fress Maroko. Selanjutnya Khaldun melibatkan diri ke dalam sebuah intrik politik dimana ia bekerjasama dengan rival Sultan Abu Inan, Amir Abu Abdullah Muhammad, untuk merebut kekuasaan sang sultan. Intrik ini melahirkan malapetaka bagi Khaldun. Ia dipenjara Sultan Abu Inan selama dua tahun begitu persengkokolan politik dan kekuasaan tersebut ditumpas. Selanjutnya Khaldun mengabdi pada Abu Salim penguasaMaroko. Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasehatnya. Pada tahun 1361 karena terjadi intrik politik yang menyebabkan terbunuhnya Abu Salim, lagi-lagi Ibn Khaldun dicurigai, dan memaksanya untuk pindah ke Granada.¹³ Setelah Abu Salim wafat pada tahun 1362, Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada. Sang raja menjadikannya duta besar. Tugas yang pernah diembannya adalah sebagai utusan Sultan Muhammad V untuk memenuhi Pedro dari Castilla, Spanyol. Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatangan perjanjian perdamaian antara kedua Negara. Karena situasi tidak bersahabat dan kebetulan mendapat undangan dai Abu Abdullah (Penguasa Bouqie) untuk diangkat menjadi Perdana Menteri, maka pada tahun 1365 ia memenuhi undangan tersebut. Namun pada tahun berikutnya ia pindah ke Konstantin menjadi pembantu Raja Abdul Abbas. Kemudian setelah merasa tidak dipercaya lagi menduduki jabatan penting, Ibn Khaldun memilih menetap di Biskra. Akhirnya, disanalah ia memutuskan untuk meninggalkan

panggung politik praktis yang dulu pernah melambungkan dan membesarkan namanya, lalu lebih memilih menekuni bidang kesarjanaannya. Nampaknya Ibn Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendirи guna menyusun karyakaryanya di benteng Banu Salamah. Dalam masa kontemplasi yang relatif singkat inilah Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, Al-Ibar beserta Muqaddimahnya.

Meskipun Ibn Khaldun hidup pada masa di mana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran atau menurut Nurcholis Madjid, pada saat umat Islam telah mengalami anti klimaks perkembangan peradabannya, namun ia mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif, yang melahirkan pemikiran-pemikiran besar yang dituangkan dalam beberapa karyanya, hampir seluruhnya bersifat orisinil dan kepeloporan.

Berikut ini beberapa karya Ibn Khaldun yang cukup terkenal, antara lain: Kitab al-I'bar wa Dhuan al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-A'rāb wa al-'Ājam wa al-Barbar wa man 'Asharahim min Dzawi al-Sūthān al-Akbar.

Karya yang dilihat dari judulnya mempunyai gaya sajak yang tinggi ini dapat diterjemahkan menjadi; oleh karena judulnya terlalu panjang, orang sering menyebutnya dengan kitab al-'Ibar saja, atau kadangcukup dengan sebutan Tarikh Ibn Khaldun.

Kitab Muqaddimah Ibn Khaldun

Kajian yang menyangkut masalah-masalah sosial, para Khaldunian cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.

Kitab al-Ta'rīf Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan

Ini adalah kitab otobiografi Ibn Khaldun secara lengkap di mana ia dipandang sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna meninggalkan riwayat hidupnya.

Pengalaman Politik Ibn Khaldun

Ibn Khaldun bekerja pada pemerintahan di bawah beberapa pemimpin kecil di Maroko dan Granada; ia bertugas dalam sebuah misi perdamaian kepada Pedro si Bengis dari Kastil (1364) dan karenanya ia mengenal politik dunia Kristen. Dia menjalin hubungan yang akrab dengan Ibn al-Khatib, wazir Granada. Ibn Khaldun sangat cerdik, tahu kapan mengubah aliansi; ia mempunyai bakat khusus untuk memahami dan bernegosiasi dengan suku-suku nomad negeri itu. Pada titik inilah menurut Muhsin Mahdi ia mulai merasa terpanggil untuk melibatkan diri dalam upaya mereformasi masyarakat melalui kekuatan sendiri atau mendorong raja agar menjadi pemimpin yang bijak.¹⁷ Akan tetapi pada usia 36 ia menyatakan dirinya terbebas dari jabatan. Ia menyatakan, disamping itu aku sudah terlampaui lama mengabaikan soal-soal pengetahuan karena itu aku memutuskan berhenti dia dari urusan pemerintah dan mengabdikan seluruh hidupku untuk belajar dan mengajar. Itu terjadi 7 tahun sebelum ia menetap bersama keluarga di dekat Oran dan akhirnya dapat menikmati 4 tahun masa pembelajaran tanpa henti (1375-1379) sebuah pengalaman luar biasa bagi seorang pakar para periode ini.

Nilai – Nilai Politik Ibn Khaldun

Masyarakat primitif dan kaum urban masing-masing terkait dengan nilai-nilai moral public; nilai-nilai badawah secara keseluruhan dianggap lebih menguntungkan oleh Ibn Khaldun ketimbang nilai-nilai hadharah. Nilai-nilai politik dipertimbangkan terutama karena dampaknya terhadap keberhasilan politik, naiknya kekuasaan, stabilitas, instabilitas dan kebobrokan masyarakat. Syariat sebaliknya dilaksanakan demi kepentingan syariat sendiri

norma-normanya harus dijunjung tinggi dalam semua keadaan. Tidak ada yang berpendapat bahwa pengalaman syariat akan menghalangi dawlah.¹⁸ Dalam hal ini pandangan Ibn Khaldun tentang proses historis bersifat Allah-sentris dan tidak dapat disejajarkan. Kemurahan hati dan perlakuan yang baik memenuhi kehidupan rakyat dan bersifat ramah kepada mereka akan memperpanjang kekuasaan dinasti itu. Ibn Khaldun mengatakan bahwa seorang raja tidak dapat memerintah dengan baik sendirian ia harus memanfaatkan hukum yang berlaku yang diterima dan dipatuhi oleh rakyat yang pada dasarnya adalah syariat.

Ekonomi Politik dan Tugas Pemerintah

Pada saat yang sama tugas jabatan publik di jelaskan secara terperinci. Kajiannya meliputi kepedulian terhadap kaum miskin, orang-orang yang mengalami kecelakaan para janda dan anak yatim serta kaum muslim yang tengah menderita. Secara umum setiap pemimpin muslim harus menjalankan fungsi standar penguasa publik dengan penuh kebijakan, dia harus melindungi umat dari musuh-musuhnya, menjalankan hukum, mencegah kekerasan terhadap manusia dan harta benda serta memberikan rasa aman. Salah satu fungsi pemerintahan adalah mengatur dan mengembangkan ekonomi dalam membahas ekonomi politik perkotaan, Ibn Khaldun memulai dengan bahasan umum ilmu ekonomi yang menyangkut makna dan penjelasan yang sebenarnya tentang penghidupan dan keuntungan sumber mata pencarian ialah pertanian, perdagangan, industri yang terdapat di kota-kota maju. Penguasa harus menjamin mata pencarian rakyatnya, mengawasi proses transaksi di antara rakyat, timbangan ukuran dan juga mata uang sehingga mereka senantiasa berlaku jujur.

Pandangan ilmu Khaldun terhadap ekonomi didasarkan atas konsep lingkaran kekuasaan dengan versi yang sedikit berbeda karena itu suatu perkembangan ekonomi dan peradaban bergantung pada terjaminnya keamanan hak milik keamanan, bergantung pada penerapan keadilan dalam transaksi transaksi ekonomi. Tidak boleh ada penyitaan sewenang-wenang atau kerja paksa. Ibn Khaldun mengembangkan kebijakan ini ke arah teori pasar modern perlakuan adil terhadap orang yang mempunyai kekayaan akan memberi mereka dorongan untuk mengembangkan modal mereka yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan pendapatan pajak negara pada pendapatan negara akan dimaksimalkan dengan pajak yang serendah mungkin karena kepercayaan masyarakat bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan merupakan modal utama aktivitas ekonomi akhirnya keuntungan adalah nilai yang direalisasikan dari kerja.

Konsep Negara Ibn Khaldun

Ibn Khaldun cenderung melepaskan konsep tentang negara dari individu pemegang kekuasaan, kadang-kadang ia menyatakan bahwa kerajaan adalah kategori umum yang dapat diaplikasikan pada bermacam-macam pemerintahan misalnya otoritas pengendalian dibutuhkan oleh masyarakat dapat berupa seseorang atau sebuah kekuatan sosial seperti agama. Bahkan ia menganggap kepemimpinan sebagai suatu jalanan hubungan ketertarikan yang dimiliki rakyat pada raja mereka bukanlah ketertarikan pada sosok atau tubuhnya, watak atau kecerdikan pikirannya mereka tertarik pada bagaimana ia berhubungan dengan mereka kerajaan adalah sesuatu yang relatif suatu hubungan antara raja dan rakyat.

Dan di antara yang paling menarik dari Mukaddimah itu adalah tentang pembahasan mengenai siklus atau fase-fase dari sebuah negara. Lalu berdasarkan teori ‘Ashabiyyah , Ibn Khaldun membuat tahapan timbul tenggelamnya suatu negara atau sebuah peradaban menjadi

beberapa fase, yaitu:

Fase pendirian negara

Ibn Khaldun berpendapat bahwa ‘Ashabiyah itulah yang membuat orang menyatukan upaya untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri dan menolak atau mengalahkan musuh. Darinya akan berdirilah sebuah kerajaan atau negara yang berdaulat.

Fase kejayaan

Tahap ini adalah menikmati buah kekuasaan seiring watak Manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabdikan peninggalan-peninggalan (mem- buat bangunan monumental, dll) dan meraih kemegahan. Negara pada tahap ini sedang berada pada puncak perkembangannya.

Fase kerusakan dan kehancuran

Penguasa dan para pembesarnya pun menjadi perusak warisan pen- dahulunya, pemuaas hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Pada tahap ini, negara tinggal menunggu waktu kehancurannya saja.

Perspektif Ibn Khaldun dan Pemerintahan Islam di Indonesia

Jika dicermati dari perspektif Ibn Khaldun, bahwa kita kembali pada kedaulatan duniawi yang tergantung pada ashabiyah dan ditujukan demi kepentingan penguasa kecuali pemimpin-pemimpin muslim bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Tatanan yang berlaku yang menempatkan kaum ulama sebagai penanggung jawab etika komunitas dan personal yang berada di bawah syariat, seraya menyerahkan kekuasaan politik kepada para pejabatnya yang didukung oleh pegawai sipil dan militer. Ada beberapa permasalahan, Ibn Khaldun tidak saja jujur namun juga ironis ketika mengatakan bahwa ulama dewasa ini adalah kaum Urban yang lemah yang dicirikan oleh kebudayaan menetap, kebiasaan hidup mewah ketenangan dan tidak mampu menjaga kehormatan diri.²⁰ Pemerintah di Indonesia membolehkan para pemimpin agama untuk berperan sebab pemerintah mengikuti syariat dan ingin melindungi umat Islam. Dia kelihatannya tidak benar-benar menyetujui praktek yang berlaku pada masanya, terutama di negara Mamluk, yang melibatkan para ulama dalam pemerintahan dan bekerjasama dengannya.

Ketika sebagian ulama mengeluh karena tidak diajak bermusyawarah mengenai persoalan negara, mereka salah menilai bentuk pemerintahan. Karena, pertama kekuasaan politik “hanya milik orang yang mengendalikan sentimen kelompok”; ulama “tidak mempunyai sentimen kelompok”, tidak menguasai urusan mereka sendiri, dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri”; mereka “tergantung kepada pihak lain”.

Kedua, otoritas pemimpin dan pemerintah harus berjalan sesuai dengan tuntutan peradaban yang berjalan alami’, dan ini tidak mengharuskan para fukaha dan ulama mempunyai bagian peran dalam otoritas ini. ²¹Ibn Khaldun mungkin saja tidak religius namun, ia memiliki tujuan sosiologi adalah menetapkan syarat-syarat yang memungkinkan munculnya kembali kesalehan primordial dan semangat keagamaan apa yang dikesampingkan dalam teori sosialnya adalah kemungkinan kekhilafahan tradisional tetapi ada sebagai sebuah instrumen permanen kecuali kalau ada intervensi Tuhan.

Berdasarkan konsep khaldunian, keadaan seperti hal tersebut adalah gejala akan “kehancuran” sebuah generasi. Dan akan menghasilkan generasi baru yang lahir dari kegelisahan banyak orang sehingga memunculkan gerakan yang diawali dengan tingkat keashabiyahan yang tinggi untuk membentuk generasi baru yang lebih baik pada awalnya. Kehancuran sebuah generasi menurut penulis tidak mutlak adalah kehancuran total sebuah

bangsa atau negara. Akan tetapi bisa saja merupakan kehancuran sebuah rezim yang berkuasa. Entah hal tersebut terjadi di tingkat pedesaan ataupun pemerintahan yang sifatnya lebih luas. Selain itu masa yang diungkapkan oleh Ibn Khaldun untuk kehancuran sebuah bangsa atau rezim menurut penulis, tidak mutlak harus menempuh periode 140 tahun pada setiap generasinya. Terlebih bangsa Indonesia memiliki cara yang konstitusional untuk menurunkan seorang pemimpin yang menjadi sebuah simbol dari sebuah rezim.

Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Manusia merupakan masyarakat yang dinamis, selalu akan mengalami perubahan, baik perubahan itu sifatnya signifikan dilihat dari banyaknya yang dapat melihat ataupun merasakan, maupun perubahan yang sifatnya lambat yang mungkin hanya akan diketahui jika dilakukan sebuah penelitian terhadap objek yang dianggap berubah tersebut. Ada pula perubahan yang sengaja direncanakan, dan adapula yang terjadi begitu saja tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat pula terjadi terhadap nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola organisasi, susunan lembaga dalam masyarakat, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, hubungan-hubungan kemasyarakatan lainnya. Sehingga hal tersbut tentu akan mempengaruhi tatanan hidup masyarakat secara global.

Perubahan sosial pun terjadi dalam Politik partai di Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut: a) Partai berideologi Nasionalis b) Partai berideologi Agamis c) Partai berideologi Nasionalis Agamis. Jika dikaji, hal ini menjadi menarik karena banyaknya partai-partai yang berbasis Islam, misalnya PPP, PKB, PKS dan masih banyak partai-partai kecil Islam lainnya menunjukkan bahwa solidaritas ummat Islam dalam sebuah partai Islam yang satu agaknya sulit tercapai dengan terkotak-kotaknya ummat Islam dalam banyak partai berbasis Islam. Jawaban politis yang muncul dari para elit partai Islam adalah dengan banyaknya partai Islam maka keterwakilan ummat Islam akan lebih banyak. Pertanyaan sebaliknya adalah, jika seandainya partai Islam bersatu tidakkah konstituen dari umat Islam yang fanatik tentu tidak akan berfikir lagi partai mana yang harus dipilihnya.

Keberadaan partai-partai berbasis Islam jika dilihat secara mendalam benar atau tidaknya menunjukkan kegoisan dari kalangan elit partai untuk menghimpun orang-orang yang se ideologi dengan mereka. Hal ini tentu dikalangan umat lain dapat membaca peta kekuatan partai-partai Islam berdasarkan partai-partai yang ada. Konsep khaldunian memandang keberadaan banyaknya partai-partai menunjukkan bahwa tingkat solidaritas dikalangan masyarakat semakin menipis dengan terpecahnya masyarakat ke dalam partai-partai yang mereka dukung. Perubahan social yang terjadi, semua organisasi Islam tersebut berusaha untuk menegakkan norma-norma atau nilai-nilai yang sesuai dengan Agama Islam. Sehingga tidak jarang memunculkan gerakan-gerakan radikal secara aksi yang melanggar nilai dan norma hukum yang berlaku. Termasuk munculnya gerakan-gerakan yang diberi label teroris kepada kelompok yang menggunakan identitas atau simbol-simbol Islam juga banyak bermunculan. Mengapa perbedaan-perbedaan itu bermunculan, bukankah Islam telah diturunkan dari satu Tuhan dan diteruskan oleh seorang Rasul. Menilik dari konsep khaldunian, maka usaha maksimal untuk menciptakan persatuan dalam perbedaan pemahaman keberagamaan mutlak harus diusahakan dengan tetap mengedepankan konsep rasional.

Bukankah Al-qur'an sendiri telah banyak menantang umat manusia untuk lebih menggunakan rasio dalam memahami ajaran-ajaran-Nya.

Ada hal lain yang menarik pada bangsa Indonesia dalam perspektif teori Ibn Khaldun adalah berkumpulnya tiga generasi dalam kurun waktu hanya setengah abad. Tiga generasi itu adalah (1) Generasi Pembangun yang dengan kesederhanaan dan solidaritas yang tulus dan tunduk di bawah otoritas kekuasaan yang didukungnya, (2) Generasi Penikmat, yakni mereka yang karena diuntungkan secara ekonomi dan politik dalam sistem kekuasaan, menjadi peka lagi terhadap kepentingan bangsa dan negara, (3) Generasi yang tidak lagi memiliki hubungan emosional dengan negara.²³ Mereka dapat melakukan apa saja yang mereka suka tanpa mempedulikan nasib negara. Dewasa ini angkatan 45 yang dapat dikategorikan sebagai generasi pertama masih banyak orang – orangnya, tetapi dalam kurun waktu yang sama juga sudah muncul generasi kedua dan ketiga. Kasus BLBI, Mega KKN di Pertamina, kasus Bank Bali dan adanya arsitek kerusuhan sosial di berbagai daerah merupakan indikator keberadaan generasi kedua dan ketiga. Ibn Khaldun meyakini bahwa masyarakat yang pada mulanya baik atau sekurang-kurangnya netral itu dirusak oleh kelompok masyarakat yang tidak berperadaban. Dalam hal ini, pada generasi ketiga di sebuah negara, dimana generasi ini lembek dan penikmat kekuasaan dan kemakmuran belaka, tanpa kerja keras dan kreatifitas, maka negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

Penutup

Dari uraian singkat di atas, ada beberapa hal yang bisa disimpulkan: Ibn Khaldun telah menyusun sebuah teori yang menjelaskan perubahan sosial dan politik dengan menggunakan sejumlah data historis dan kontemporer dari Dunia Islam. Teori sejarahnya tidak bersifat siklus, melainkan seperti gelombang: pasang dan surutnya sebuah kepemimpinan terjadi dengan sendirinya secara berulang-ulang, didorong oleh kekuatan dasar yang sama.

Dan pandangannya terhadap masyarakat primitif merupakan pemberi kekuatan pendorong menuju bentuk negara, sementara komunitas menetap (urban) sebagai sebagian akibat dari kerusakan.

Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan negara. Islam bukan sekedar ajaran ritualitas melainkan juga memberi petunjuk yang fundamental tentang bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan negara.

Negara yang terbentuk didasari pada ashabiyyah, biasanya berumur tiga generasi, yakni sekitar 120 tahun. Satu generasi dihitung umur yang biasa bagi seseorang yaitu 40 tahun. Ketiga generasi tersebut ialah:

- a. Generasi pertama, hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh darikemewahan dan kehidupan kota, masih tinggal di pedesaan.
- b. Generasi kedua, berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan Negara, sehingga generasi ini beralih dari kehidupan primitif yang keras ke kehidupan kota yang penuh dengan kemewahan.
- c. Generasi ketiga, negara mengalami kehancuran, sebab generasi ini tenggelam dalam kemewahan, penakut dan kehilangan makna kehormatan, keperwiraan dan keberanian.

Bibliografi:

- Antony Black, *The History of Islamic Political Thought; From the Prophet to the Present*, terj. Abdullah Ali & Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).
- Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Harun Nasution, *Hubungan Islam dan Negara* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1992)
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, *Muqadimmah Ibn Khaldun* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1989) Prof. Dr. Achmad Mubarok, MA, *Meraih Kebahagiaan Dengan Bertasawuf* (Jakarta:Khazanah Baru, 2002)
- Rahman Zainudin, *Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik, Ibn Khaldun* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)
- Toto Suharto, *Epistemologi Sejarah Kritis Ibnu Khadun* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2006)
- Zainab al-Khudairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun* (Bandung: Pustaka, 1987)